

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN	5
1.5 DEFINISI OPERASIONAL	6
1.6 METODE PENELITIAN	7
1.6.1 Pendekatan Masalah	7
1.7 SUMBER BAHAN HUKUM.....	7
1.7.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8

1.7.2 Analisis Bahan Hukum	8
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	11
2.1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	11
2.2 SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	14
2.3 HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	22
2.4 INSTRUMEN PEMERINTAHAN	24
2.5 PELAYANAN PUBLIK DALAM KONSEP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	50
2.6 ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK	55
2.6.1 Konsep Dasar Perizinan.....	55
2.6.2 Perizinan Sebagai Instrumen Hukum Sikap Tindak Administrasi Negara	60
2.6.3 Program Dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik	63
2.7 BIROKRASI PELAYANAN (PERIZINAN).....	63
BAB III	66

KEDUDUKAN PENERBITAN IZIN USAHA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIJINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN	66
3.1 PENGERTIAN PERIZINAN.....	66
3.2 PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN TAHUN 1926 NOMOR 226.....	66
3.3 PERIZINAN USAHA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.....	71
3.4 JENIS-JENIS DAN PROSEDUR PERIZINAN.....	74
3.4.1 Surat Izin Usaha Perusahaan	74
3.4.2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP).....	81
3.4.3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....	82
3.4.4 Surat Izin Tempat Usaha (SITU).....	84
3.4.5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	87
3.4.6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	92
3.5 LEMBAGA YANG BERWENANG MENGELUARKAN IZIN USAHA	98
3.6 SANKSI ATAS PELANGGARAN KENTENTUAN IZIN	99
3.7 SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KENTENTUAN IZIN	100

BAB IV	102
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	102
4.1 PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DI PEMPROV DKI JAKARTA	102
4.2 IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA	108
BAB V	122
PENUTUP	122
5.1 KESIMPULAN	122
5.2 SARAN	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	127